

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun dan harus disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- a) Menyiapkan Rencana Strategis
- b) Menyiapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- c) Membuat Perjanjian Kinerja
- d) Melakukan Evaluasi Kinerja
- e) Melakukan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- f) Melakukan Pengukuran Pencapaian Kinerja

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Dari Laporan Kinerja pada Tahun 2022 dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

- 1) Dari analisis terhadap sasaran 1, yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, realisasi kinerja

mencapai 104,52% yang berarti bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah dalam urusan perencanaan.

- 2) Dari analisis terhadap sasaran 2, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, realisasi kinerja mencapai 98,01%. Dimana, pada tahun 2022 berdasarkan kinerja tahun 2021 nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target 78,25 dan terealisasi 76,69.
- 3) Dari analisis terhadap sasaran 3, yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, realisasi kinerja mencapai 112,84%. Dimana pada tahun 2022 Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi ditargetkan sebesar 83% terealisasi 93,66%, dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah sangat baik.
- 4) Pelayanan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai 3 sasaran strategis dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 19.067.129.634.- dapat direalisasikan sebesar Rp 18.920.620.969.- atau sebesar 99,23%.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi internal yang intensif agar peningkatan kinerja baik pada staf sampai eselon 3 bisa terus ditingkatkan.

2. Mensosialisasikan dan melakukan upaya maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat “Indeks Kualitas Perencanaan” agar sasaran strategis tersebut bisa dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga tujuan Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas bisa diwujudkan.

3. Meningkatkan peran koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda Kab/Kota agar perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan bisa dijalankan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

